

## Gerakan Perempuan Subaltern Ekofeminisme dalam Melawan Pembangunan PLTU 2 Indramayu

### Women's Movement Subaltern Ecofeminism in Fighting the Development of PLTU 2 Indramayu

Cusdiawan<sup>1)</sup>, Oekan S. Abdoellah<sup>2)\*</sup> & Firman Manan<sup>3)</sup>

1) Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

2) Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

3) Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Diterima: 22 Juli 2021; Direview: 22 Juli 2021; Disetujui: 26 Oktober 2021

\*email: [oekan.abdoellah54@gmail.com](mailto:oekan.abdoellah54@gmail.com)

#### Abstrak

Riset ini meneliti perjuangan perempuan dalam menolak pembangunan yang dinilai merusak lingkungan. Masalah yang ditanyakan dalam penelitian ini, yaitu "Bagaimana proses gerakan perempuan subaltern ekofeminisme di Indramayu dalam melawan pembangunan Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2?". Sementara tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan proses gerakan perempuan subaltern ekofeminisme di Indramayu dalam melawan pembangunan PLTU 2. Riset ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif berperspektif feminis, dan berlangsung di Desa Mekarsari Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu yang menjadi tempat pembangunan PLTU 2. Bagi para perempuan yang diidentifikasi sebagai kelompok subaltern, karena posisi mereka yang berada di luar representasi sosial dan politik, pembangunan tersebut akan semakin memarginalisasikan mereka. Sebab itu, mereka melakukan perlawanan dalam bentuk gerakan sosial. Dalam gerakan tersebut, para perempuan mengafirmasikan semangat ekofeminisme. Artikel ini melihat proses gerakan tersebut dengan pendekatan integrasi gerakan sosial (struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi dan proses pembingkai), sehingga faktor struktur ekonomi politik, struktur mobilisasi dan pembingkai dianggap bagian yang penting bagi proses kemunculan dan perkembangan suatu gerakan.

**Kata Kunci:** Gerakan Sosial; Subaltern; Ekofeminisme.

#### Abstract

*This research examines the struggle of women in rejecting development that is considered damaging to the environment. The problem asked in this study, namely "How is the process of the subaltern ecofeminism women's movement in Indramayu against the construction of PLTU 2?". Meanwhile, the purpose of the research is to describe the process of the subaltern ecofeminism women's movement in Indramayu against the construction of PLTU 2. This research was conducted using a qualitative method with a feminist perspective, and took place in Mekarsari Village, Patrol District, Indramayu Regency which became the site of PLTU 2 construction. subaltern groups, because of their position outside of social and political representation, this development will further marginalize them. Therefore, they took the fight in the form of social movements. In this movement, women affirm the spirit of ecofeminism. This article looks at the process of the movement with a social movement integration approach (political opportunity structure, mobilization structure and framing process), so that the factors of political economy structure, mobilization structure and framing are considered an important part of the process of emergence and development of a movement*

**Keywords:** Social Movements; Ecofeminism; Subaltern.

**How to cite:** Cusdiawan, Abdoellah, O.S., & Manan, F., (2022), Gerakan Perempuan Subaltern Ekofeminisme dalam Melawan Pembangunan PLTU 2 Indramayu, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1397 -1408



## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan diskursus yang melaluinya berbagai pihak mencoba untuk memaknai dunia dan mengubah dunia ini menurut kepercayaan dan pandangan mereka. Pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah dengan retorika untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan, belum tentu diartikan sebagai pembangunan oleh warga yang terdampak paling merugikan dari prosesnya. Bagi mereka yang tersingkir, proses tersebut lebih diartikan sebagai peminggiran karena dalam proses maupun sebaran manfaat hasilnya tidak jarang warga setempat hanya dijadikan penonton atau malah korban kemajuan, maka yang pemerintah lakukan tidak lebih sebagai penghancuran ketimbang pembangunan (Abdoellah & Mulyanto, 2019).

Fenomena di atas terjadi di banyak tempat, salah satunya di Indramayu yang rencananya akan dibangun proyek PLTU 2 yang akan dimulai pada tahun 2022. Adapun desa yang menjadi tempat pembangunan tersebut, yakni Desa Mekarsari Kec. Patrol. Bagi sebagian warga desa tersebut, proyek PLTU 2 lebih diartikan sebagai peminggiran terhadap mereka karena akan mengancam ruang hidup mereka. Para warga yang berusaha mempertahankan ruang hidupnya tersebut kemudian melakukan perlawanan dalam bentuk gerakan sosial.

Gerakan sosial sendiri didefinisikan sebagai upaya kolektif upaya kolektif masyarakat untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial. Kemunculan gerakan sosial dimulai dari adanya konflik, isu-isu seputar ketimpangan, adanya dominasi sosial, kondisi-kondisi yang demikian (yang dijalankan dan dipertahankan oleh institusi-institusi maupun lembaga-lembaga sosial) akan memunculkan perlawanan, pemberontakan dan semacamnya sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tatatan sosial yang lebih berkeadilan, kebebasan dan sebagainya (Singh, 2010).

Adapun fokus dalam artikel ini, yakni pada gerakan perempuannya, yang diidentifikasi sebagai gerakan perempuan *subaltern*. Istilah *subaltern* di sini mengacu pada salah satu konsep dalam feminis pascakolonial yang dipopulerkan oleh Gayatri Spivak, yang disebut juga sebagai kelompok "bisu", "tidak berkelas" (Spivak, dalam Ashcroft, Griffiths, dan Tiffin (ed), 2008). Mereka adalah entitas yang berada di luar representasi sosial dan politik (Kartika, 2014). Sebab itu, mereka kesulitan untuk menyuarakan apa yang menjadi keresahan dan isi pikirannya, karena persoalan akses. Dengan demikian, gerakan perempuan dalam penelitian ini mendasarkan pada analisis feminisme pascakolonial. Adapun yang menjadi dasar logika dalam penelitian feminis pascakolonial, yakni mengungkapkan peran perempuan sebagai agensi perubahan yang selama ini "tersembunyi" atau jarang terungkap (Hendrastiti, 2019)

Dalam konteks penelitian dalam artikel ini, para perempuan yang melakukan perlawanan atas PLTU 2 tersebut berasal dari kalangan bawah, bukan kelas menengah dan tidak terdidik secara formal. Kondisi inilah yang menyebabkan mereka pada mulanya kesulitan untuk menyuarakan apa yang menjadi isi pikiran dan keresahan mereka. Meskipun di satu sisi mereka menyadari bahwa pembangunan PLTU 2 akan mengancam ruang hidup mereka yang selama ini menggantungkan pada lahan pertanian, tapi pada sisi yang lain mereka tidak tahu dengan cara apa dan kepada siapa mereka bisa melakukan protes atas kebijakan pembangunan yang akan semakin memarjinalisasikan mereka. Dalam kondisi itulah peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti WALHI Jawa Barat menjadi penting. WALHI turut membantu mengorganisasi warga dan mengadvokasi mereka untuk menyalurkan aspirasi dan keresahan mereka. Warga yang menolak PLTU 2 kemudian bergabung dalam kelompok Jatayu (Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu), yang di dalamnya perempuan turut bergabung.

Isu utama yang menjadi perhatian gerakan tersebut, yakni isu lingkungan. Bagi para perempuan *subaltern* di Indramayu, pembangunan PLTU yang didirikan di atas lahan pertanian, bukan hanya menghancurkan produktivitas mereka yang selama ini menggantungkan pada pertanian, tapi juga mengancam kelestarian lingkungan dan akan merugikan mereka dan anak cucu mereka kelak. Dalam konteks inilah, gerakan perempuan beridentitas *subaltern* tersebut dikategorikan sebagai gerakan ekofeminisme. Dalam ekofeminisme, sebagaimana yang diteorikan oleh Vandana Shiva, pembangunan yang semakin meluas justru membawa dampak yang lebih



merugikan bagi kaum perempuan. Dengan mengatasnamakan pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang dilakukan justru seringkali merugikan kaum perempuan (Shiva, 1997). Ekofemisme pun mengasumsikan kedekatan perempuan dengan pertanian (Ponda, 2021). Para perempuan *subaltern* dengan semangat ekofeminis di Indramayu ini, tercatat melakukan berbagai aksi protes yang menyoroti berbagai lembaga, seperti DPRD Indramayu, Pemerintah Kabupaten Indramayu, PLN, dan lain-lain, yang dilakukan dalam kurun waktu dari 2015 sampai sekarang.

Gerakan perempuan *subaltern* ekofeminis ini dilihat dengan menggunakan pendekatan integrasi gerakan sosial. Dalam integrasi gerakan sosial, sebuah gerakan dilihat berdasarkan struktur kesempatan politik (*political opportunities*), struktur mobilisasi (*mobilising structures*) dan proses pembingkaihan (*framing processes*) (McAdam et al., 1996). Dalam struktur kesempatan politik, yang dilihat adalah struktur ekonomi politik yang memungkinkan atau menyebabkan kemunculan suatu gerakan, sementara proses pembingkaihan berbicara sumberdaya yang dimiliki oleh sebuah organisasi gerakan, dan proses pembingkaihan berbicara bagaimana masyarakat mendefinisikan situasinya atau mengenai pemaknaan.

Ada berbagai literatur yang dijadikan sebagai tinjauan studi terdahulu, yaitu *Perempuan dan Negara dalam Era Indonesia Modern* (2009) yang ditulis oleh Susan Blacburn dan diterbitkan oleh Kalyanamitra. Dalam studinya tersebut, Blacburn melakukan kategorisasi gerakan perempuan berdasarkan identitas, yang terdiri dari: (1). Prinsip keagamaan dan non keagamaan; (2) Kelas perempuan dari keluarga miskin, atau kelas menengah ke atas; (3). Geografis, perkotaan atau pedesaan (Blacburn, 2009). Studi lainnya, yaitu artikel yang ditulis oleh Titiek Kartika Hendrastiti yang berjudul "Tutur Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan" yang dimuat dalam *Jurnal Perempuan* Vol.24 No.1, Februari 2019, yang berisi gerakan perempuan subaltern dengan membawa semangat lingkungan (Hendrastiti, 2019). Studi lainnya, yaitu artikel yang ditulis oleh Abdullah Abdul Muthaleb yang berjudul "Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam: Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh" yang diterbitkan oleh *Jurnal Perempuan*, Vol.24. No.4, November 2019, yang berisi perjuangan perempuan pedesaan dalam mengakses informasi sumber daya (Muthaleb, 2019). Studi lainnya yaitu artikel yang ditulis oleh Titiek Kartika Hendrastiti dan Pramasasti Ayu Kusdinar yang berjudul "Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan" yang dimuat dalam *Jurnal Perempuan*, vol.24, No.4, November 2019 (Hendrastiti & Kusdinar, 2019). Adapun yang menjadi keunikan penelitian ini, yaitu dengan dipadukannya ekofeminisme dan feminisme pascakolonial.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu "bagaimana proses gerakan (struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi sumber daya, proses pembingkaihan) perempuan *subaltern* ekofeminisme di Indramayu dalam melakukan perlawanan atas PLTU 2?". Sementara yang menjadi tujuannya, yaitu "mendeskripsikan proses gerakan (struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi sumber daya dan proses pembingkaihan) perempuan *subaltern* ekofeminisme dalam melakukan perlawanan atas PLTU 2".

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini yaitu kualitatif. Alasan dipilihnya metode kualitatif, karena salah satu kekuatan metode kualitatif sendiri yakni ketika digunakan untuk meneliti proses interaksi. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Donatella Della Porta, bahwa riset kualitatif digunakan salah satunya untuk melihat suatu proses interaksi (looks at processes of interactions) (Porta, 2014). Tentu saja hal tersebut relevan, karena penelitian ini berupaya melihat proses gerakan perempuan di Indramayu.

Adapun metode penelitian dalam artikel ini berperspektif feminis, yang memungkinkan perempuan berbicara untuk dirinya sendiri, mengisi celah sejarah, menolak stereotip dan konstruksi identitas yang dipaksakan dari luar. Dengan demikian, mereka dapat mengungkap kesejarahan mereka melalui validasi tentang kehidupan mereka yang sesungguhnya (Meij, 2009).



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kemunculan Protes *Subalten* Ekofeminisme di Indramayu dalam Perspektif Struktur Kesempatan Politik

Pada intinya, yang dijelaskan dalam perspektif struktur kesempatan politik, yaitu struktur politik atau ekonomi politik yang bagaimana yang memengaruhi dan menyebabkan kemunculan dan atau berkembangnya suatu gerakan sosial. Sidney Tarrow dan Donna Della Porta kemudian mengembangkan apa yang disebut sebagai *complex internationalism* dan *multilevel opportunity structure* (Subono, 2017). Dengan kalimat lain, kemunculan suatu gerakan sosial akan dilihat berdasarkan dimensi-dimensi internasional dan domestik (*the double track of political opportunity structures*), dalam hal ini yang berkaitan dengan struktur politik atau ekonominya.

Untuk melihat dimensi internasional ini, Nur Iman Subono, pakar gerakan sosial dari Universitas Indonesia, mengajukan 4 poin untuk menganalisis gerakan masyarakat adat di Amerika Latin. Adapun 4 poin tersebut, yaitu ambruknya komunisme; berkembangnya pemikiran dan gerakan yang memfokuskan pada isu-isu demokratisasi, hak asasi dan lingkungan; kukuhnya kapitalisme neo-liberal; adanya jaringan internasional (Subono, 2017). Keempat poin tersebut terkait antar satu dengan yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Poin yang ditulis oleh Nur Iman Subono mempunyai relevansi untuk menjelaskan kemunculan protes dari para perempuan Indramayu. Argumen peneliti didasarkan pada suatu fakta, bahwa terbentuknya Jatayu (Jaringan Asap Batu Bara Indramayu), kelompok masyarakat yang melawan pembangunan PLTU 2, yang di dalamnya terdapat para perempuan *subaltern* yang turut membawa semangat ekofeminisme, hal itu berkat andil dan perhatian dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang menaruh perhatian besar pada persoalan lingkungan. Adapun LSM tersebut, meliputi LSM seperti WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Jawa Barat, dan LSM Internasional seperti FoE (Friends of the Earth) Japan.

Dengan demikian, ambruknya komunisme dan delegitimasi atasnya, dalam konteks politik global, memberikan ruang perhatian lebih terhadap isu-isu lingkungan maupun marginalisasi perempuan, yang terutama banyak dilakukan oleh aktor non-negara seperti LSM. Dari situasi tersebut, turut berandil dalam membentuk Jatayu, yang kemunculannya juga diorganisasi oleh LSM yang memfokuskan perhatian pada isu lingkungan. Secara teoretik, apa yang disebut sebagai gerakan sosial baru, seperti gerakan yang memfokuskan pada isu gender, lingkungan dan sebagainya, juga merupakan respon kritis atas gerakan sosial lama yang lebih memfokuskan pada politik kelas yang mengambil inspirasi dari marxisme klasik (Singh, 2010).

Selain dua hal di atas, dimensi internasional lainnya, yang juga saling berkaitan, yaitu neoliberalisme atau globalisasi neoliberal. Nur Iman Subono menjelaskan bahwa kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu, ada gerakan yang serentak mengarah pada pemujaan terhadap pasar atau diistilahkan: fundamentalisme pasar. Dalam proyek ini terkandung keyakinan bahwa bukan hanya produksi, konsumsi dan distribusi yang tunduk pada hukum pasar, tetapi seluruh kehidupan ini (Subono, 2017)

Dikatakan saling berkait, karena ambruknya komunisme memberikan keleluasaan bagi ekspansi neoliberalisme, termasuk di dalamnya bagaimana negara-negara maju berusaha untuk mengeksport desain demokrasi yang sejalan dengan kepentingan mereka, termasuk demokrasi yang sejalan dengan kepentingan pasar. Adapun salah satu contoh kongkretnya, yaitu maraknya angka-angka PDB (Produk Domestik Bruto) yang digunakan sebagai tolak ukur kemajuan. PDB jelas sejalan dengan kepentingan pasar. Hal tersebut, dijelaskan juga oleh Lorenzo Fioramonti, seorang profesor ekonomi-politik University of Pretoria yang mengemukakan bahwa selama beberapa dekade terakhir kebijakan-kebijakan berbasis PDB mendominasi di hampir seluruh negara. Padahal, ia menjelaskan bahwa angka-angka PDB bisa terus naik dan diiringi oleh kerusakan lingkungan (Fioramonti, 2017). Dalam konteks artikel ini, kemunculan gerakan perempuan *subaltern* ekofeminisme merupakan respon terhadap kebijakan yang mendasarkan pada dalih pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi, dalam hal ini yaitu pembangunan PLTU 2. Para perempuan menganggap pembangunan yang menurut pemerintah bermanfaat untuk memasok listrik di Jawa dan Bali, serta untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi ini, dianggap oleh para perempuan *subaltern* ekofeminisme sebagai suatu hal yang





bukan hanya merampas ruang hidup dan mata pencaharian mereka, tetapi juga menghadirkan kerusakan lingkungan.

Hal lain yang dibahas dalam dimensi internasional, yaitu jejaring internasional. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, pembentukan Jatayu salah satunya berkat andil FoE Japan. Itu artinya, FoE Japan pun bagian dari jejaring internasional Jatayu. Adanya jejaring internasional ini jelas memengaruhi gerakan, salah satunya yaitu memungkinkan permasalahan warga di sekitar PLTU 2 disuarakan dalam arena internasional. Tercatat, perwakilan Jatayu pernah dua kali mengunjungi Jepang, yang dalam pemberangkatannya selalu melibatkan perempuan. Di Jepang, selain menemui otoritas yang berwenang (JICA), mereka pun turut menyuarakan tuntutan-tuntutan mereka di jalanan.

Sementara itu, dalam konteks domestik, ada beberapa hal yang menurut hemat peneliti memengaruhi kemunculan gerakan *subaltern* ekofeminisme di Indramayu ini. Pertama, yaitu sistem politik yang demokratis. Tentu kondisi ini berbeda bila kita bandingkan dengan rezim non-demokratis seperti yang terjadi selama kepemimpinan Soeharto. Dalam rezim demokratis, jelas memungkinkan suatu gerakan dapat muncul sebagai bentuk partisipasi politiknya. Hal ini nampak jelas juga pada fenomena gerakan di Indramayu dalam melawan pembangunan PLTU 2 ini. Di samping menyuarakan aksi protes di jalanan, di depan gedung-gedung pemerintahan dan sebagainya, mereka juga melakukan gugatan melalui mekanisme peradilan. Dengan kalimat lain, gerakan penolakan terhadap PLTU 2 ini ditempuh melalui dua jalur, yang pertama yakni jalur ekstra-institusional, dan yang keduanya melalui jalur institusional.

Dimensi domestik lainnya yang memengaruhi kemunculan gerakan *subaltern* ekofeminisme tersebut, yakni kebijakan dari negara itu sendiri, dalam hal ini pembangunan PLTU. Kehadiran PLTU 2 ini jelas berdampak pada perubahan situasi sosial-ekonomi masyarakat sekitar, mengingat proyek PLTU akan berdiri di area persawahan yang selama ini menjadi mata pencaharian warga. Para warga pun belajar dari pengalaman tetangga desa mereka yang sebelumnya menjadi tempat pembangunan PLTU 1, di mana kehadiran PLTU 1 di samping mengusir mata pencaharian warga, juga berdampak buruk bagi kondisi lingkungan. Dampak buruk dari adanya PLTU 1 pun dirasakan oleh warga, seperti penyakit ispa dan lain-lain, juga menurunkan produktivitas penghasilan dari kelapa sawit. Dampak buruk lainnya yaitu tercemarnya air laut di sekitar PLTU 1, yang berdampak pada kehidupan nelayan. Sebagian warga desa Mekarsari sendiri, yang merupakan tempat dibangunnya proyek PLTU 2, berprofesi sebagai nelayan, sehingga mereka pun merasakan dampak negatif dari pembangunan PLTU 1 yang berlokasi di desa tetangga mereka.

Bagi para perempuan di sekitar lokasi proyek PLTU sendiri, kondisi tersebut jelas merugikan mereka, di samping alasan yang sudah dikemukakan sebelumnya mengenai mereka yang akan tergusur dari kerja produktif (bertani), kondisi seperti ancaman terhadap kesehatan anak-anak mereka, penghasilan suami yang juga berprofesi sebagai nelayan yang menurun, juga semakin menambah beban lebih bagi mereka, mengingat konstruksi dalam masyarakat yang memberikan beban kerja domestik terhadap mereka. Singkat kata, kondisi-kondisi tersebut semakin membebani kerja-kerja domestik perempuan. Dari hal itulah yang menjadi titik berangkat para perempuan *subaltern* ini mengapa mereka melakukan penolakan terhadap pembangunan PLTU 2. Dengan demikian, para perempuan *subaltern* pun memandang bahwa kebijakan PLTU 2 tersebut tidak sensitif gender, karena tidak memerhatikan nasib mereka selaku kaum perempuan atau ibu-ibu.

Para perempuan itu menyayangkan bagaimana mereka yang tidak terlalu dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan PLTU 2 ini, padahal proyek PLTU 2 jelas akan sangat berdampak bagi kehidupan mereka. Selain itu, bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah pun tidak menjawab permasalahan jangka panjang yang menjadi keresahan para perempuan yang melakukan penolakan PLTU 2 itu. Adapun permasalahan jangka panjang yang dimaksudkan di sini, seperti persoalan lingkungan dan mata pencaharian. Para perempuan masih mempertanyakan mengenai pekerjaan apa yang mereka bisa lakukan, jika lahan pertanian yang selama ini jadi tumpuan utama mereka, digunakan untuk pembangunan PLTU 2. Terlebih lagi bagi para perempuan atau ibu-ibu,



di mana yang bisa mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka memang dari pertanian. Dengan kalimat lain, bagi para perempuan sekitar, yang mereka butuhkan adalah solusi jangka panjang, bukan bantuan-bantuan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Dalam pandangan mereka, selama ini negara belum mampu menjawab tuntutan jangka panjang mereka, terutama yang berkaitan dengan ruang hidup mereka. Terlebih lagi, bantuan sosial untuk kepentingan jangka pendek pun hanya diterima oleh mereka yang pro terhadap proyek PLTU 2 ini.

Poin lainnya yang memengaruhi gerakan tersebut, yakni adanya perilaku elite politik lokal yang koruptif pada pembangunan PLTU 1. Adapun yang dimaksud elite politik lokal di sini, yakni pejabat di lingkungan kabupaten Indramayu dalam soal pembebasan lahan untuk proyek PLTU 1 yang lebih dulu dibangun di tetangga desa mereka. Korupsi tersebut bahkan melibatkan Irianto MS Syafiuddin, yang saat proses pembangunan PLTU 1 berlangsung, ia masih menjabat sebagai bupati Indramayu. Sehingga ketika proyek PLTU 2 digulirkan, fenomena korupsi pada pembangunan PLTU 1 memengaruhi gerakan penolakan PLTU 2 karena menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat setempat kepada elite politik lokal yang melanjutkan kepemimpinan Irianto MS Syafiudin. Para perempuan bersama laki-laki pun tercatat beberapa kali melakukan aksi dengan meminta KPK agar mengawasi dan mengusut dugaan korupsi dalam proyek PLTU 2 tersebut. Sebagai catatan juga, penerus Irianto MS Syafiudin sebagai bupati Indramayu yang sebelumnya terbukti koruptif pada pembangunan PLTU 1, yaitu kerabatnya sendiri, yakni isterinya yang sempat menjadi bupati Indramayu selama dua periode (meski di periode kedua ia tidak melanjutkan kepemimpinan sampai selesai).

Bagi para perempuan *subaltern* ini, proyek PLTU 2 di samping tentunya merugikan para buruh tani dan mengancam kelestarian ruang hidup mereka, proyek PLTU 2 juga dianggap menguntungkan segelintir elite ekonomi lokal, dalam hal ini para pemilik modal di sekitar lokasi proyek PLTU 2. Adapun hal menguntungkan bagi pemilik modal tersebut, misalnya saja dalam soal pengadaan alat-alat berat, proses pengerukan tanah dan lain-lain. Sementara mereka sebagai warga kecil, "di luar representasi sosial dan politik", masyarakat pinggiran, pembangunan tersebut hanya akan membawa dampak yang sangat merugikan, termasuk bagi masa depan atau keberlangsungan hidup anak cucu mereka.

### **Ketahanan dan Perkembangan Organisasi Gerakan dalam Perspektif Mobilisasi Sumber Daya**

Charles Tilly berpendapat bahwa dalam mobilisasi sumber daya, hal penting yang perlu ditekankan adalah jejaring informal dan formal yang menghubungkan individu-individu dengan organisasi-organisasi gerakan (Tilly, 1978). Itu artinya, gerakan sosial ditinjau dari struktur mobilisasi sumber daya, maka aspek yang tidak bisa diabaikan adalah soal struktur sosial.

Selain itu, dalam mobilisasi sumber daya, sebagaimana yang diteorikan oleh pakar gerakan sosial seperti Kladermans, masalah kepemimpinan pun menjadi aspek penting dalam menciptakan sumber daya mobilisasi bagi para peserta aksi (Kladermans, 2005). Sementara itu, pakar gerakan sosial lainnya, yaitu Diarmuid Maguire, membagi sumber daya ke dalam dua jenis, jenis pertama yaitu yang bersifat nyata, seperti uang; keduanya, yakni jenis yang tidak nyata, seperti kepemimpinan, pengalaman berorganisasi, kemampuan manajerial, taktik dan sebagainya (Maguire, 1995).

Dalam konteks gerakan di Indramayu ini, yang menjadi sumber daya utama dalam gerakan tersebut, yaitu para warga sekitar yang terkena dampak merugikan dari adanya proyek PLTU 2 tersebut. Adapun warga sekitar yang dimaksud, terutama dari kalangan buruh tani, termasuk di dalamnya adalah kalangan perempuan. Selain para perempuan buruh tani, sumber daya lainnya yaitu para nelayan yang akan mengalami kerugian juga dengan adanya proyek PLTU 2 tersebut, mengingat adanya PLTU akan membuat pantai laut yang sebelumnya menjadi tempat mereka menghidupi diri dan keluarga, perairannya akan tercemar dengan adanya PLTU 2 dan akan memengaruhi hasil tangkapan ikannya.



Para perempuan buruh tani di sekitar proyek PLTU 2 tersebut ketika mendengar akan dibangun PLTU 2 di desa mereka. Mereka sudah mempunyai kesadaran bahwa proyek tersebut akan memengaruhi kehidupan mereka dan memberi dampak yang negatif, mengingat dengan latar belakang mereka, mustahil bagi mereka untuk terserap ke dalam pembangunan. Akan tetapi, sebagaimana yang disinggung sebelumnya, meski mereka sudah mempunyai kesadaran tersebut, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk memperjuangkan nasib dan ruang hidup mereka.

Para perempuan itu bersama laki-laki kemudian tergabung dalam organisasi Jatayu yang terbentuk pada 2015. Terbentuknya organisasi tersebut merupakan andil besar dari WALHI dan FoE Japan. Meski demikian, awal mula terbentuknya Jatayu bisa juga dikatakan berkat andil dari sisa-sisa gerakan lama yang sebelumnya melakukan penolakan pada PLTU 1. Dengan kalimat lain, terbentuknya Jatayu ini, di samping ada peran WALHI Jawa Barat dan FoE Japan, ada juga peran dari individu yang sebelumnya terlibat dalam gerakan penolakan PLTU 1 yang kemudian mengorganisasi para warga yang akan terdampak proyek PLTU 2 untuk melakukan perlawanan.

Detailnya, cikal bakal Jatayu merupakan kelanjutan dari gerakan yang menolak PLTU 1. Saat itu, belum ada penamaan organisasi dan individu-individu yang tergabung ke dalam organisasi gerakan berasal dari 7 desa, beberapa di antaranya yaitu Bantar Gebang, Mekarsari, dan lainnya. Akan tetapi, organisasi gerakan ini kurang solid, akibat ada berbagai kepentingan yang berbeda-beda dari masing-masing aktor gerakan. Hingga selanjutnya, organisasi ini diambil alih atas inisiatif seorang yang berinisial "S" atas bantuan WALHI Jawa Barat dan FoE Japan untuk mengorganisasi ulang organisasi gerakan pada tahun 2015. Dalam prosesnya, organisasi ini kemudian diberi nama Jatayu dan "S" ini kemudian menjadi ketua pertama Jatayu. Selain pak "S", FoE Japan dan WALHI Jawa Barat, aktor lainnya yang berperan penting dalam pembentukan ulang organisasi, atau dengan kalimat lain berperan pada awal mobilisasi sumber daya, beberapa di antaranya adalah "R". Selain laki-laki, aktor perempuan yang berperan penting dalam pembentukan awal adalah perempuan berinisial "K". Ibu "K" saat itu begitu vokal menentang proyek PLTU 2, karena ia menolak menjual sawahnya untuk pembangunan PLTU 2 tersebut.

Berbicara mengenai sumber daya materi, organisasi gerakan mengandalkan "urunan" atau iuran dari para anggota. Iuran tersebut digunakan untuk mengadakan kegiatan rutin setiap minggunya, seperti doa bersama, yang juga dimanfaatkan sebagai sarana mengkonsolidasikan gerakan, dan juga digunakan untuk melakukan aksi protes yang berlangsung di berbagai tempat, seperti di Gedung Sate Bandung, Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, dan lain-lain. Selain mengandalkan iuran atau keswadayaan internal, mereka pun mendapat bantuan keuangan dari WALHI. Dengan demikian, masalah finansial bukan menjadi kendala bagi organisasi gerakan.

Adapun yang menjadi kendala bagi organisasi gerakan, yaitu kurang berpengalamannya para anggota. Hal tersebut terlihat misalnya saja saat mereka tidak mengantisipasi kemungkinan terjadinya kriminalisasi atau upaya-upaya yang bertujuan menggembosi gerakan. Meski demikian, kepemimpinan perempuan bisa dikatakan cukup baik. Hal tersebut terlihat misalnya saja saat ada masalah kriminalisasi, seperti insiden bendera terbalik, beberapa anggota laki-laki Jatayu menghadapi proses hukuman dan ini jelas merugikan perempuan, karena beban kerja yang biasa dilakukan bersama suami, harus mereka kerjakan sendiri. Para anggota perempuan Jatayu berinisiatif melakukan iuran untuk membantu keuangan anggota perempuan yang suaminya saat itu menghadapi proses hukuman. Menariknya, para anggota perempuan yang saat itu suaminya tengah menghadapi hukuman, memanfaatkan keadaan tersebut untuk menanamkan kesadaran pada anak-anak mereka, bahwa ayah mereka adalah pejuang lingkungan, dan karena itu perlu diteruskan.

Adapun salah satu strategi yang dilakukan untuk mengkonsolidasikan gerakan, yakni dengan mengadakan acara rutin setiap minggunya. Dalam konteks itu, peran perempuan pun terbilang penting. Perempuan bertanggung jawab dan memastikan agar acara tersebut terlaksana, bukan hanya dalam soal memastikan tempat, ketersediaan dana, dan apa-apa yang dibutuhkan dalam kegiatan rutin tersebut. Adapun acara rutin tersebut sudah berlangsung kurang lebih lima tahun, dan dengan demikian masih tetap bertahan dan terus dilakukan dari awal pendirian Jatayu



hingga saat ini. Untuk menjaga konsistensi individu-individu dalam keterlibatan pada acara tersebut secara khusus, peran perempuan pun terbilang unik dan dilakukan dengan “cara-cara keseharian”.

Adapun yang dimaksud “cara-cara keseharian” di sini, yaitu cara-cara yang terlihat sederhana dan berkaitan langsung dengan aktivitas keseharian mereka, seperti saat mereka di pasar, warung, sawah, di jalanan, pengajian dan sebagainya, di mana dari kegiatan keseharian tersebut kemudian mereka membuka obrolan mengenai keberlangsungan gerakan dan saling mengingatkan dan menyemangati antar satu dengan lainnya untuk selalu turut hadir dalam kegiatan. Cara tersebut meski terlihat sederhana, tapi berperan besar bagi keberlangsungan organisasi gerakan, karena dapat menguatkan ikatan secara emosional, termasuk pengingat akan komitmen “ideologis” mereka. Itu artinya, melalui tanggung jawab domestik yang biasa dipikul oleh perempuan dalam kerja keseharian, mereka justru menciptakan “ruang publik politis” baru.

Selain cara-cara di atas, untuk memobilisasi sumber daya, baik untuk mempertahankan internal maupun memengaruhi orang-orang luar, para perempuan turut menggunakan instrumen budaya atau kesenian. Mereka menggunakan tembang atau lagu-lagu yang mewakili keresahan dan permasalahan bersama, untuk menguatkan kekuatan emosi antar sesama mereka, juga untuk memengaruhi orang-orang di luar gerakan.

Poin lainnya yang tidak bisa diabaikan dalam perspektif mobilisasi sumber daya, yaitu struktur organisasi. Adapun struktur organisasi Jatayu sendiri, terdiri dari Dewan Pengarah, kemudian Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator. Mekanisme pemilihan pimpinan organisasi sendiri dilakukan dengan musyawarah, dan untuk ketua dan wakil ketua dipilih secara umumnya dengan pertimbangan sebagai orang yang dituakan. Sementara untuk koordinator yang memang usianya lebih muda, dipilih dengan pertimbangan lebih melek soal teknologi (penggunaan sosial media), sehingga diharapkan lebih memudahkan untuk berkomunikasi dengan individu atau organisasi lainnya.

Bila melihat secara struktural di dalam organisasi Jatayu, peran perempuan jelas nampak kurang strategis, karena yang mengisi pos-pos jabatan pimpinan adalah laki-laki. Akan tetapi, pada praktiknya mekanisme pengambilan keputusan di Jatayu lebih bersifat egaliter, termasuk menyoal hubungan antar individu di Jatayu itu sendiri. Bahkan sifat egalitarianisme ini semakin ditegaskan dengan sikap para pemimpin Jatayu ini yang “tidak merasa” sebagai ketua, karena yang paling diutamakan adalah kebersamaan di dalam segala hal yang menyangkut kepentingan organisasi. Dalam konteks inilah, sesungguhnya perempuan pun mempunyai hak yang sama dengan anggota laki-laki, dalam menyuarakan aspirasi atau pendapatnya yang berkaitan dengan keberlangsungan organisasi.

Menjadi catatan penting, bahwa secara teoretis, fenomena egaliter terjadi pada komunitas *subaltern*. Identitas stratifikasi sosial yang sangat tipis adalah produk dari pengalaman penindasan. Pengalaman sebagai komunitas tersembunyi dan bisu membuat komunitas *subaltern* mengonstruksi kerekatan sosial melalui solidaritas dan identitas. Salah satu prakondisi dari upaya konstruksi itu adalah bangunan relasi yang egaliter (Kartika, 2014). Adanya kedekatan pengalaman ketertindasan ini juga yang memungkinkan adanya kerja sama antara perempuan dan laki-laki dalam membangun gerakan.

### **Subalten dan Ekofeminisme sebagai Identitas Gerakan dalam Perspektif Proses Pembangkitan**

Menurut pakar gerakan sosial seperti Robert Benford dan David Snow, ada tiga poin penting yang perlu diperhatikan dalam proses pembangkitan pada suatu gerakan sosial, yakni: (1). *Diagnostic framing*; (2). *Prognostic framing*; (3). *Motivational framing*. Kedua pakar tersebut menjelaskan bahwa dalam tahapan pertama, yang dilakukan adalah mengidentifikasi siapa atau apa yang menjadi sumber atau penyebab permasalahan sehingga melahirkan aksi protes tersebut. Sementara pada tahapan kedua, yakni solusi atau jalan keluar yang diinginkan oleh para aktor gerakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan, sekaligus mengidentifikasi strategi, taktik dan target yang seperti apa yang mereka rumuskan. Tahap ketiganya, setelah memahami dan



merumuskan kedua poin di atas, mereka kemudian mengajak partisipan untuk bergerak dan beraksi secara bersama-sama dan hal ini melibatkan proses psikologis (Benford & Snow, 2000).

Dalam proses pembimbingan pada gerakan di Indramayu ini, pertama-tama yang diidentifikasi sebagai sumber permasalahan adalah pembangunan PLTU 2, di mana sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, pembangunan tersebut dianggap akan memarginalisasikan warga sekitar terutama mereka yang berasal dari kalangan bawah. Sementara itu, aktor yang dianggap bertanggung jawab menyebabkan permasalahan itu muncul, yaitu lembaga negara dan para pejabat pemerintah, beberapa diantaranya, yaitu PLN selaku pemangku kebijakan terkait, kemudian elite politik lokal dalam hal ini pejabat desa Mekarsari. Menurut para anggota Jatayu, pemerintah desa turut bertanggung jawab, karena pemerintah desa saat itu memberi keterangan bahwa lahan di desa Mekarsari bukanlah lahan yang produktif, dan pemerintah desa turut memberi persetujuan atas dibangunnya proyek PLTU 2 tersebut. Perlu dipertegas bahwa adapun pemerintah desa yang dimaksud di sini mengacu kepada dua kepemimpinan pemerintahan yang berbeda, kepemimpinan pertama bertanggung jawab karena memberi keterangan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan pemerintah desa yang melanjutkan kepemimpinan selanjutnya, juga menyepakati dan melanjutkan agenda pemerintahan sebelumnya, di samping ia turut aktif melakukan pertentangan dengan warga yang menolak pembangunan PLTU 2, bahkan ia turut menjadi saksi yang memberatkan warga atas insiden bendera terbalik yang sarat akan nuansa kriminalisasi.

Selain lembaga negara dan elite politik lokal, yang diidentifikasi sebagai masalah lainnya, yaitu para pemilik modal. Bagi para perempuan buruh tani, pembangunan tersebut hanya untuk kepentingan pemilik modal, dibanding untuk mewujudkan kesejahteraan. Sebagian warga desa Mekarsari pun, dalam hal ini para pemilik tanah, turut dianggap sebagai sumber masalah, karena mereka memberi persetujuan dibangunnya PLTU 2 tersebut. Bagi para anggota Jatayu, para pemilik tanah ini hanya memikirkan kepentingan jangka pendek dan tergiur dengan adanya kompensasi dari pembebasan lahan. Para pemilik tanah dianggap tidak memikirkan masalah jangka panjang, seperti persoalan kelestarian lingkungan yang akan terancam dengan adanya PLTU 2. Para pemilik tanah pun tidak memikirkan nasib sebagian besar warga Desa Mekarsari, dalam hal ini yang tergolong kelas buruh tani, yang selama ini menggantungkan hidup pada pertanian. Terlebih lagi, dibangunnya PLTU 2 pun akan mencemari air laut yang akan dilalui kapal laut pengangkut batu bara, yang artinya juga akan merugikan warga yang selama ini menggantungkan mata pencaharian sebagai nelayan.

Bukan hanya pemerintah Indonesia ataupun aktor lokal yang diidentifikasi sebagai permasalahan, juga melibatkan pemerintahan negara lain, dalam hal ini pemerintah Jepang. Pemerintah Jepang diketahui membantu berbagai proyek pembangunan PLTU 2 di Indonesia, baik dalam bentuk bantuan teknologi maupun dana pinjaman, dan pembangunan PLTU 2 di Indramayu salah satunya. Hal tersebut, sebagaimana yang tertulis dalam situs KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas), bahwa skema pendanaan pembangunan PLTU 2 Indramayu, yakni dari APBN dengan pinjaman luar negeri. Adapun monitoring proses pinjaman dan pengadaan tanah melibatkan berbagai pihak, salah satunya adalah JICA (Japan Internasional Cooperation Agency).

Dalam hemat peneliti, gerakan kelompok *subaltern* tersebut, sekalipun terlihat dalam konteks yang sangat lokal, tapi sesungguhnya mempunyai korelasi dengan tatanan global. Dengan kalimat lain, protes atau gerakan yang terlihat sangat lokal ini mempunyai tautan perlawanan terhadap tatanan global. Hal tersebut bisa terlihat bahwa pembangunan PLTU 2 sendiri didasarkan pada semangat pertumbuhan ekonomi yang itu artinya bagian dari sistem kapitalisme global. Fioramonti mengemukakan bahwa sejak beberapa dekade terakhir, kebijakan-kebijakan berbasis pertumbuhan ekonomi atau PDB memang mendominasi hampir seluruh negara-negara di dunia, dan PDB jelas sejalan dengan kepentingan sistem kapitalisme (Fioramonti, 2017). Sementara itu, warga Jatayu jelas menolak pembangunan PLTU 2, yang itu artinya juga penolakan terhadap kapitalisme global.

Sementara itu, pada tahap kedua, solusi yang diinginkan oleh para aktor gerakan, yaitu pembatalan proyek pembangunan PLTU 2. Bagi Jatayu, tanah seharusnya dikelola oleh rakyat dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukannya untuk proyek PLTU. Apa yang disebut sebagai pembangunan sendiri, tidak bisa dilakukan dengan memarginalisasikan suatu identitas tertentu, termasuk kaum perempuan. Para perempuan Jatayu menginginkan agar apa yang disebut sebagai pembangunan, turut menjamin kelestarian lingkungan, dan tidak menggusur ruang hidup perempuan dan keturunan mereka kelak. Pembangunan tidak bisa dilakukan tanpa keberpihakan pada orang-orang yang berasal dari kalangan bawah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagi para perempuan Jatayu, protes mereka terhadap proyek pembangunan PLTU 2, bukan hanya untuk pembelaan atas kepentingan sosial ekonomi mereka sendiri, melainkan juga bagi keberlangsungan lingkungan dan generasi yang akan datang. Pembangunan tidak bisa memangkas apa yang seharusnya dimiliki oleh generasi yang akan datang, seperti lingkungan yang sehat dan sebagainya. Dalih pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dianggap hanya untuk kepentingan para elite ekonomi dan tidak sensitif gender.

Selain pembatalan proyek PLTU 2 sebagai poin utama yang diinginkan oleh gerakan, poin lainnya yang diinginkan dan ini untuk rencana jangka pendek, yaitu para perempuan buruh tani maupun buruh tani secara umumnya yang tetap dibolehkan untuk mengelola lahan pertanian yang sudah dibeli oleh negara, selagi pembangunan fisik dari PLTU 2 belum berdiri. Untuk poin kedua yang berjangka pendek ini, warga, termasuk para perempuan buruh tani ini masih melakukan hingga sekarang, meski tentu saja hal tersebut sebenarnya tidak sejalan dengan mekanisme hukum yang seharusnya berlaku. Jatayu sendiri menginginkan tanah persawahan yang sudah dibeli oleh negara ini, untuk sementara waktu dikelola secara komunal.

Sementara itu, pada level taktik, Jatayu melakukan perlawanan dengan memadukan perjuangan melalui mekanisme institusional dan ekstra-institusional. Adapun mekanisme institusional yang ditempuh, yakni dengan mengajukan gugatan di PTUN terkait persoalan perizinan. Sementara mekanisme ekstra-institusional yang dilakukan, yakni dengan melakukan aksi protes di berbagai lembaga. Selain melakukan aksi protes kepada pemerintah daerah, PLN, DPR-RI, warga pun melakukan aksi protes di depan gedung KPK karena menduga ada persoalan korupsi di balik proyek PLTU 2. Dugaan korupsi ini, bukan hanya didasarkan karena fakta bahwa pada proyek pembangunan PLTU 1 terbukti ada tindak pidana korupsi, tapi juga karena persoalan biaya ganti rugi tanaman yang diduga digelapkan. Istana kepresidenan pun turut menjadi sasaran protes dari Jatayu, tercatat Jatayu pernah berdialog dengan Kantor Staff Kepresidenan dan Setneg.

Taktik lainnya, yakni dengan memasang poster penolakan atas PLTU 2 di jalanan desa Mekarsari. Di samping itu, jejaring dengan DOM (Dermayu Ora Meneng), memungkinkan untuk semakin tersebarnya tuntutan Jatayu di sosial media, seperti di laman facebook. Jatayu pun aktif untuk menggalang solidaritas bersama gerakan-gerakan berbasis lingkungan lainnya. Selain itu, jejaring dengan FoE Japan pun memungkinkan tuntutan-tuntutan Jatayu disebar di dunia internasional.

Sementara itu, pada tahapan *motivational framing*, nampak jelas bagaimana identitas *subalternitas* menjadi wacana yang penting di dalam gerakan. Para perempuan menyadari, bahwa mereka adalah orang-orang yang berada pada posisi paling bawah dalam relasi sosial, sehingga dari situlah muncul rasa solidaritas bersama untuk melakukan tindakan kolektif. Dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh Jatayu hingga ketika melakukan aksi, para perempuan kerap kali menyebut diri sebagai “rakyat kecil”, “wong cilik” dan sebagainya. Mereka menganggap pembangunan PLTU hanya akan semakin memarginalisasikan posisi mereka sebagai “rakyat kecil” atau orang-orang yang berada pada posisi paling bawah dalam relasi sosial.

Selain *subalternitas*, lingkungan pun menjadi bagian penting dalam identitas gerakan. Bagi para perempuan Jatayu, pembangunan PLTU bukan hanya merugikan mereka dari sisi sosial-ekonomi, tapi yang paling utama juga yakni masalah lingkungan yang terancam, termasuk bagi keberlangsungan anak cucu mereka kelak. Para perempuan pun menyadari betapa masalah pertanian begitu dekat dengan perempuan. Dari sini semangat ekofeminisme nampak jelas diperlihatkan sebagai bagian penting dalam gerakan perempuan di Indramayu. Salah satu

karakteristik ekofeminsme, yakni sebagaimana yang ditulis oleh Aurora Ponda (dalam Ponda, 2021), yakni memandang kedekatan antara perempuan dan pertanian.

## SIMPULAN

Kemunculan gerakan kelompok subaltern ekofeminisme di Indramayu, merupakan respon terhadap kebijakan pembangunan PLTU 2 yang berlangsung di desa mereka yaitu Mekarsari. Kemunculan gerakan tersebut, berkat andil organisasi seperti FoE Japan dan WALHI Jawa Barat. Bagi para perempuan subaltern tersebut, pembangunan PLTU 2 hanya akan semakin memarjinalisasikan mereka, dan akan berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan. Para perempuan ini menganggap bahwa pembangunan PLTU 2 mengabaikan nasib kaum perempuan atau ibu-ibu, dan dengan demikian tidak sensitif terhadap persoalan gender. Perlawanan mereka pun bagian dari ketidakpercayaan mereka terhadap para elite politik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Adapun terbukanya celah politik bagi mereka untuk memperjuangkan aspirasi mereka, karena sistem politik yang demokratis, meskipun dalam arti minimum. Bagi para perempuan subaltern sendiri, upaya mempertahankan ruang hidup, pertanian, bukan hanya persoalan sosial-ekonomi, melainkan juga harga diri karena pertanian dianggap bagian penting dalam kehidupan budaya mereka. Perjuangan mereka bagian dari upaya untuk mendapatkan pengakuan. Dalam konteks persoalan finansial untuk membiayai pergerakan, mereka lebih mengandalkan swadaya (urunan), meskipun mereka juga mendapat bantuan dari organisasi pendamping seperti WALHI. Relasi yang berkembang di dalam organisasi gerakan sendiri lebih bersifat egaliter, yang dalam kajian pascakolonial hal tersebut dikarenakan adanya pengalaman ketertindasan yang hampir sama di antara masing-masing individu dalam pergerakan..

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, O. S., & Mulyanto, D. (2019). *Isu-Isu Pembangunan Pengantar Teoretis*. Gramedia.
- Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. *Annual Review of Sociology*, 26, 611–639.
- Blacburn, S. (2009). *Perempuan dan Negara dalam Era Modern*. Kalyanamitra.
- Fioramonti, L. (2017). *Problem Domestik Bruto: Sejarah dan Realitas Politik di Balik Angka Pertumbuhan Ekonomi* (Terjemahan). Marjin Kiri.
- Hendrastiti, T. K. (2019). Tutar Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan. *Jurnal Perempuan*, 24 No.1, 6–28.
- Hendrastiti, T. K., & Kusdinar, P. A. (2019). Keterlibatan Perempuan Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan. *Jurnal Perempuan*, 24, No.4.
- Kartika, T. (2014). *Perempuan Lokal Vs Tambang Pasir Besi Global* (1 ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kladermans, B. (2005). *Protes dalam Kajian Psikologi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Maguire, D. (1995). Opposition Movements and Opposition Parties: Equal Partners or Dependent Relations in the Struggle for Power and Reform? In J. C. Jenkins & B. Kladermans (Ed.), *The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social Movements*. University of Minnesota Press.
- McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (1996). "Toward an Integrated Perspective on Social Movements and Revolution." In M. I. Lichbach & A. S. Zuckerman (Ed.), *Comparative Politics*. Cambridge University Press.
- Meij, L. S. (2009). *Ruang Sosial Baru Perempuan Tionghoa: Sebuah Kajian Pascakolonial* (1 ed.). Yayasan Obor Indonesia.
- Muthaleb, A. A. (2019). Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam: Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh. *Jurnal Perempuan*, 24, No.4.
- Ponda, A. (2021). *Asal-usul Ekofeminisme: Budaya Patriarki dan Sejarah Feminisasi Alam* (1 ed.). Cantrik Pustaka.
- Porta, D. Della. (2014). Social Movement Studies and Methodological Pluralism: An Introduction. In D. Della Porta (Ed.), *Methodological Practices in Social Movements Research*. Oxford University Press.
- Shiva, V. (1997). *Bebas dari Pembangunan. Terjemahan Hira Jhamtani*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Singh, R. (2010). *Gerakan Sosial Baru. Terjemahan Eko P. Darmawan*. Resist Book.
- Spivak, G. C. (2008). "Can the Subaltern Speak?" In Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, dan Helen Tiffin (ed). (2008). *The Post Colonial Studies Reader, Second Edition*. Routledge.
- Subono, N. I. (2017). *Dari Adat ke Politik: Transformasi Gerakan Sosial di Amerika Latin*. Marjin Kiri.



**Cusdiawan, Oekan S. Abdoellah & Firman Manan**, Gerakan Perempuan *Subaltern Ekofeminisme* dalam Melawan Pembangunan PLTU 2 Indramayu

Tilly, C. (1978). *From Mobilization to Revolution*. Addison-Wesley.

